

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Permasalahan

Pandemi COVID-19, hingga pertengahan tahun 2021, telah melaporkan 182.721.608 kasus positif dan 3,9 juta jumlah kematian secara global. Munculnya COVID-19 juga telah menyebabkan kehancuran ekonomi yang parah dengan perkiraan bahwa kekayaan global sebesar USD \$22 triliun akan hilang di tahun-tahun berikutnya dikarenakan tingginya faktor kematian dan kehilangan pekerjaan terkait dengan pandemi tersebut (Alhammadi, 2022). Pandemi telah membuat semua negara menegakkan kerja sama global berbasis kesehatan untuk memastikan dan meningkatkan kelangsungan hidup mereka dengan kesadaran bahwa pandemi ini memiliki tingkat kesembuhan yang tergolong sulit, terutama mempertimbangkan tingkat penularannya yang mudah sehingga mengakibatkan adanya lonjakan drastis. Meskipun begitu, terlepas dari munculnya diplomasi kesehatan dan aliansi yang ditempa, tahap interaksi politik antara negara-negara besar bergeser untuk saling menyalahkan satu sama lain, alih-alih meningkatkan kerja sama untuk pulih bersama. Contoh yang paling menonjol dapat ditunjukkan dari interaksi antara Tiongkok dan Amerika Serikat, yang melibatkan '*Blame Game*' dan '*War of Words*'. Media Barat mengklaim bahwa virus itu kemungkinan besar berasal dari Institut Virologi Wuhan dan Donald Trump terus menyebut pandemi itu sebagai 'virus Cina'. Tiongkok, di sisi lain, membalas bahwa virus itu tidak dimulai di Wuhan, tetapi justru datang dari AS — sebagai semacam senjata biologis

yang bermula dari kolaborasi pelatihan militer akhir 2019 mereka. Namun, terlepas dari tuduhan dan kebetulan-kebetulan yang terjadi, pusat pandemi telah beralih ke AS alih-alih Wuhan — memproyeksikan Tiongkok sebagai negara yang berhasil memerangi wabah sekaligus menggambarkan keinginannya untuk membantu dunia dalam menangani pandemi (Gauttam et al. , 2020). Selain itu, diplomasi kesehatan yang diprakarsai oleh Tiongkok telah menjadi bantuan yang cukup dermawan untuk membangun citranya sebagai pemimpin dunia yang baik hati di banyak negara dunia ketiga (Kobierecka, 2022) melalui pasokan sigap kebutuhan COVID-19, seperti masker, vaksin, obat-obatan, atau bahkan peralatan laboratorium. Perihal lainnya adalah selama pembentukan Prakarsa Sabuk dan Jalan atau *Belt and Road Initiative*, kerja sama kesehatan internasional sangat dihargai selama lebih dari lima tahun—terutama mengingat merebaknya pandemi COVID-19. Mengkaitkan kontribusi BRI dalam memerangi pandemi dengan menekankan keunggulan konektivitas dan pembangunan komunitas global dengan memerangi takdir yang sama, politik luar negeri dilihat mampu mengatasi krisis. Terlepas dari pandangan Barat bahwa diplomasi kesehatan Beijing gagal di belahan bumi Barat, keberhasilan Tiongkok lebih dikaitkan dan ditargetkan ke negara-negara di luar Eropa sehingga meningkatkan pengaruh politik dan kekuasaannya di wilayah-wilayah utama BRI (Rudolf, 2021). Salah satu bukti intensitas diplomasi kesehatan yang dilaksanakan Tiongkok dalam memerangi pandemi dapat diangkat melalui isu kerja sama kesehatan yang tercermin melalui Indonesia dan Tiongkok.

Membahas mengenai bidang kesehatan sebelum pandemi terutama pada industri farmasi, Indonesia memiliki pangsa pasar obat terbesar di ASEAN pada

kisaran 27%, dengan 73% pasar didominasi oleh industri farmasi lokal. Walaupun persentase pasar ini cukup besar, industri farmasi Indonesia masih bergantung kepada pihak luar untuk mendapatkan impor 95% bahan baku mentah untuk produksi farmasi yang mencapai nominal 21 triliun rupiah pada tahun 2013 (Erlangga *et al.*, 2020). Situasi kondisi industri kesehatan di Indonesia dapat dikatakan semakin meningkat—hal ini dikarenakan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga tahun 2021, terdapat 17 industri bahan baku farmasi, 241 industri produksi farmasi, 18 industri yang berkecimpung di bidang ekstraksi produk alam dan 132 industri obat tradisional. Dari tahun 2015 hingga 2021 pun, perusahaan produsen alat-alat medis meningkat dari 193 pabrik hingga mencapai 891 perusahaan—menunjukkan bahwa industri lokal untuk produksi alat-alat kesehatan telah tumbuh di kisaran 361.66% atau sejumlah 698 perusahaan (Kementerian Investasi Republik Indonesia, 2021). Hal ini juga menunjukkan bahwa usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor industri farmasi dan alat kesehatan untuk kebutuhan negeri, semakin meningkat dan terkoordinir.

Kerja sama kesehatan antara Indonesia dan Tiongkok diprakarsai terlebih dahulu oleh aktor negara melalui kerja sama politik. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui kedaulatan komunis Cina. Republik Rakyat Cina atau Tiongkok menjalin interaksi dengan Indonesia semenjak awal tahun 1950 melalui jalur diplomatik formal—walaupun terjadi perubahan dramatis semenjak bergolaknya peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965—dikarenakan adanya keterlibatan Tiongkok dalam peristiwa ini. Kejadian ini mengakibatkan kemunculan pergerakan anti-komunis

dan anti-Cina sepanjang Oktober 1965 hingga pertengahan tahun 1967—mengakibatkan puluhan ribu anggota atau terduga pendukung komunis terbunuh dan membuat Indonesia dan Tiongkok saling membekukan dan menunda relasi satu sama lain di tahun 1967. Bertahun-tahun setelahnya, lebih tepatnya tahun 1985, Indonesia akhirnya mengimplementasikan perdagangan langsung dengan RRC dan lima tahun setelahnya, Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri Indonesia dan Qian Qichen selaku Menteri Luar Negeri Tiongkok, menandatangani MoU kerjasama relasi diplomatik antar kedua negara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perubahan dinamika kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok bermula dari kerjasama politik yang kemudian berubah menjadi kerjasama ekonomi yang di saat bersamaan menjadi faktor kunci peningkatan kerja sama antara dua negara terkait (Ku, 2002).

Selama rentang waktu 23 tahun (1967-1990), pembekuan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok masih berlangsung walaupun Indonesia tetap menerapkan kebijakan *One-China Policy* dan hubungan ekonomi antara kedua negara tetap berlanjut. Di tengah masa pembekuan tersebut, pada bulan Juli 1985, kedua negara mencapai kesepakatan Trade Memorandum di Singapura. Akibatnya, nilai perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan dari USD 110 juta pada tahun 1985 menjadi USD 361 juta pada tahun 1987 (Suryadinata, 1990), meningkat sebanyak 228% dalam waktu dua tahun. Faktor ekonomi ini menjadi alasan utama Indonesia untuk menormalisasikan hubungan dengan Tiongkok. Selain itu, KADIN, sebagai organisasi ekonomi di Indonesia, juga mendorong pemerintah untuk melakukan normalisasi hubungan

diplomasi guna tidak melewatkan peluang dengan bangkitnya ekonomi Tiongkok (Anwar, 2009).

Peran *non-state actors* dalam kerja sama kesehatan di sektor ini juga masih menjanjikan, seperti investor swasta dalam negeri ataupun asing, mengingat bidang ini memiliki potensi tinggi yang menarik bagi investor swasta ataupun asing dikarenakan populasi masyarakat Indonesia yang padat (Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, 2021). Salah satu contoh dari pengalaman pribadi penulis adalah kehadiran China-ASEAN Technology Transfer Center yang berpusat di Guangxi sebagai salah satu peserta pameran pada INARI Expo 2022 silam, yang menekankan kerjasama di bidang riset dan teknologi kesehatan di antara Tiongkok dan Indonesia.

Kerja sama kesehatan yang dibahas pada penelitian ini menekankan pada masa pandemi COVID-19 yang merajalela di tahun 2020 – 2022. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara dan menduduki peringkat keempat di Asia dikarenakan penyebaran penyakit yang cepat dan jutaan warga yang tinggal di negaranya—termasuk juga kedatangan dan keberangkatan masyarakat, wisatawan, ataupun pelaku bisnis yang fluktuatif. Sementara itu, ketika pandemi COVID-19 merebak, Indonesia menerima banyak bantuan dari Tiongkok untuk penanganan COVID-19—baik itu berupa sumbangan dosis vaksin, kesepakatan pembuatan hub vaksin di Indonesia, ataupun peningkatan suplai untuk alat-alat dan bahan habis pakai medis guna mencegah atau menangani COVID-19.

Pada Maret 2020, pemerintah telah mengumumkan bahwa Indonesia akan melakukan *rapid test* massal pada warga negara dengan *serology-based kit* yang akan mengeluarkan hasilnya dalam waktu sepuluh hingga tiga puluh menit. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah memesan 500.000 alat tes dari Cina, meskipun tidak ada satu pun alat yang lulus uji klinis pada saat itu—membuat hasilnya rentan terdiagnosis sebagai *false positive* ataupun *false negative*, tetapi tetap cukup baik untuk mencegah, menekan, dan melacak perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia (Djalante et al., 2020). Meskipun uji klinis untuk kit COVID-19 saat itu masih minim, kerja sama internasional antara Tiongkok dan Indonesia tetap stabil, bahkan meningkat. Pada Januari 2021, vaksin virus corona dari Tiongkok bahkan telah disetujui oleh Indonesia, memberikan anggapan bahwa negara tersebut memegang tampuk kepemimpinan guna bertanggungjawab pada program yang mereka sebut sebagai '*Health Silk Road*'. Perusahaan vaksin Tiongkok seperti Sinovac, CanSinoBIO, Sinopharm, IMBCAMS, dan Anhui Zhifei Longcom Bio—telah menyepakati kontrak pengiriman vaksin yang terdiri dari 26 negara: Indonesia juga salah satunya (Rudolf, 2021). Hal ini semakin dibuktikan dengan peristiwa di awal Juni 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, tiba di pertemuan tingkat tinggi di Yunnan dengan Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok. Pertemuan tersebut akhirnya diakhiri dengan kesepakatan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi vaksin Covid-19 secara regional, dengan pembangunan pabrik bahan baku farmasi, serta memperkuat penelitian dan pengembangan obat. Pengamatan penulis juga menyatakan bahwa

merek-merek peralatan laboratorium Tiongkok mulai merajalela dan bahan habis pakai kegiatan laboratorium ataupun keperluan kesehatan yang diperlukan telah menaklukkan sebagian besar pasar kesehatan Indonesia karena kemandirannya yang terus berkembang, pengadaan dan pasokan yang mudah, ditambah persaingan harga yang kompetitif. Walaupun begitu, berdasarkan pengalaman pribadi penulis, kualitas dan garansi peralatan laboratorium yang digunakan acapkali dipertanyakan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk klien prospektif sebelum mengeksekusi keputusan mereka.

Apabila menilik dari proses kerja sama Tiongkok dan Indonesia, mekanisme kerja sama di antara kedua negara selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 - 2022 sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia—menciptakan *herd immunity* untuk memperkuat kesehatan nasional, meningkatkan dan memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia, sekaligus memperbesar kesempatan ekonomi bagi warganya yang terus bertambah. Ketika upaya bantuan dilakukan, diharapkan ekonomi nasional akan terus meningkat, meskipun perlahan akibat pandemi—atau karena masyarakat beradaptasi dengan '*new normal*' selama pandemi, ekonomi yang lambat tapi stabil dapat diharapkan kontinu meskipun pandemi telah memukul parah perekonomian Indonesia.

Berbicara tentang kerja sama, dilanjutkannya perjanjian bilateral juga membawa keuntungan tersendiri bagi bagi kedua negara. Tiongkok menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar impor yang paling prospektif dan Indonesia mendapatkan bantuan mumpuni dalam penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya dikarenakan kesepakatan untuk membangun produksi vaksin terpusat di

Indonesia akan memungkinkan Tiongkok untuk mendistribusikan vaksin mereka dengan mudah ke seluruh wilayah Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya (Malik, 2022). Kesepakatan ini akan sangat membantu dalam menghadapi serangan pandemi, terutama mengingat pasokan vaksin akan terjamin—terutama ketika masyarakat diharuskan mengambil beberapa dosis vaksin dalam jangka waktu tertentu—dan pada akhirnya mengurangi risiko kadaluwarsa penyimpanan vaksin yang singkat, sehingga mempertahankan kemanjurannya dan meningkatkan daya tahannya dalam memerangi virus COVID-19. Merujuk terhadap keadaan tersebut, meskipun ada kesepakatan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Tiongkok, masih perlu dipelajari ketergantungan kompleks yang terjadi di antara kerja sama kesehatan bilateral tersebut; karena kerja sama ini memungkinkan proyeksi Cina sebagai pemimpin besar yang bertanggung jawab dan menyalurkan negaranya ke jalur perdagangan prospektif yang akan terus berlanjut. Meski telah menjalin kerja sama selama 70 tahun, interaksi yang meningkat pada akhirnya akan mempengaruhi sikap Indonesia dalam berinteraksi dengan Tiongkok. Terutama memperhatikan ketergantungan kedua negara ini di sektor kesehatan lain seperti industri, perdagangan, riset dan pengembangan, dan edukasi—yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi dan adanya ketergantungan kompleks di panggung global, memungkinkan *soft power diplomacy* terfokus pada kerja sama yang membuktikan adanya integrasi perdagangan global (Hveem & Pempel, 2016) atau dalam hal ini adalah kerja sama yang dibahas dengan Indonesia. *Soft power* ini memungkinkan negara tersebut memiliki kemampuan untuk mendapatkan tujuannya melalui ‘ketertarikan’, bukan melalui ancaman. Tidak hanya dengan

pengaruh, *soft power* adalah kemampuan untuk memikat dan menarik (Nye Jr., 2008). Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat *soft power* dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka untuk memenuhi tujuan mereka sehingga karena *soft power* ini dapat beriringan dengan interdependensi mengenai kebutuhan yang saling diberikan oleh kedua pihak, baik itu keuntungan secara sosial, politik, ataupun ekonomi di antara Indonesia dan Tiongkok. Oleh karena itu, kompleksitas saling ketergantungan yang terjadi di antara hubungan bilateral kedua negara ini semakin erat dan intens, yang sebagian besar memungkinkan tercapainya *national interest* masing-masing negara seiring dengan kontinuitas yang kooperatif, berdaya tahan tinggi, dan merupakan penanganan efektif dalam menyelesaikan kebutuhan kesehatan masyarakat terutama masyarakat Indonesia.

Indonesia mengalami banyak kesulitan ketika pandemi melanda. Penanganan pandemi di Indonesia seperti pembatasan pergerakan memang membantu membatasi penyebaran virus dan menyelamatkan nyawa, namun hal ini juga membuat adanya krisis sosial-ekonomi di keluarga Indonesia dikarenakan ketidakseimbangan penghasilan yang menimpa rumah tangga yang masih mengalami kerentanan terhadap kemiskinan (UNICEF, 2022). Selain itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan di Indonesia, Indonesia hanya memiliki 321.544 ranjang rumah sakit – untuk menangani 270 juta jiwa – sehingga kurang lebih terdapat 1,2 ranjang rumah sakit per 1.000 populasi yang mana merupakan statistika lebih rendah dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, rasio dokter dan populasi di Indonesia hanya mencapai 0.38

dokter per 1000 populasi di tahun 2017. Oleh karena itu, melalui statistika ini saja, terdapat tiga isu yang harus ditangani oleh bidang kesehatan Indonesia dalam penanganan pandemi: 1) kekurangan tenaga dan fasilitas; 2) kurangnya peralatan pelindung dalam penanganan COVID-19; 3) isu pendanaan operasional (Deloitte, 2020).

Indonesia pun berusaha menangani dan bertahan di era pandemi dengan berbagai macam kebijakan dan menghindari *blame game* yang terjadi mengenai penyebaran dan asal COVID-19 serta berfokus untuk akselerasi pemulihan ekonomi, melindungi warga negaranya, mengamankan kedaulatan, dan memperkuat kepemimpinan internasionalnya. Beberapa cara tersebut adalah dengan menggunakan strategi 4+1 untuk kebijakan luar negerinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah: 1) *supply chains, investment, and cross-border travel* yang bertujuan untuk mengamankan akses negara terhadap bahan baku, manufaktur teknologi, dan sumber daya pekerja yang mana contohnya adalah kolaborasi Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan untuk produksi gabungan yang meningkatkan suplai alat perlindungan diri dan produk-produk lain yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19; 2) *repatriation and vaccination* yang dikoordinasikan melalui Kementerian Luar Negeri untuk merepatriasi 120.000 WNI dari 53 negara dari Januari hingga Juli 2020 dan diplomasi vaksin dengan para produsen—yang mana diplomat-diplomat Indonesia berhasil mengamankan vaksin dari Tiongkok, Arab, dan Inggris serta menjadi negara pertama yang bergabung dengan *World Health's Organization's Solidarity Trial* yang bertujuan untuk menciptakan dan menguji vaksin COVID-19 dengan 22 rumah sakit yang

berpartisipasi; dan 3) *national sovereignty, regional autonomy*—dengan tujuan untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi dan melindungi warga negaranya, Indonesia mengambil pendekatan pragmatis guna mewujudkan kepentingannya melalui akses teknologi kesehatan dan ekonomi dari Tiongkok dan mendiversifikasi suplai vaksinya dari negara-negara seperti Australia, Prancis, Jepang, Amerika, dan Singapura sekaligus mempertahankan independensinya pada isu kontestasi seperti klaim pada Laut Cina Selatan; 4) *leadership as middle power* yang membuat Indonesia meluaskan aktivitas diplomatiknya untuk mendorong ASEAN sebagai pemimpin regional guna melawan pandemi dan memotivasi kerja sama antara ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan di ASEAN+3 serta pengorganisasian pendanaan untuk penanggulangan COVID-19 melalui ASEAN (Fitriani, 2021).

Selama pandemi berlangsung, tidak dipungkiri bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok jelas akan memengaruhi hubungan bilateral antara kedua negara—terutama membahas bilamana kerja sama ini menambah tantangan atau memberikan prospek baru. Terutama apabila memerhatikan sentimen media domestik Indonesia, walaupun memang pandemi membuat Indonesia dan Tiongkok merambah ke lingkup kerja sama yang lebih luas, tidak dapat dihindari bahwa hubungan domestik antara pribumi dan WNI keturunan Tiongkok juga mengalami perubahan yang berkebalikan. Keturunan etnis Tionghoa di Indonesia tetap mengalami diskriminasi di tengah-tengah kontestasi politik domestik, walaupun adanya kontestasi ini tidak bermakna menjadi sentimen negatif yang menghalangi hubungan kerja sama bilateral kenegaraan antara Indonesia dan

Tiongkok. Tidak hanya itu, proses penyediaan vaksin Indonesia dari Tiongkok juga menuai kontroversi. Hal ini bermula dari akhir tahun 2021, ketika tingkat vaksinasi di Indonesia mencapai 54,87% untuk dua dosis, dengan 79,54% penduduk menerima dosis pertama. Meskipun tingkat vaksinasi tidak setinggi negara-negara maju lainnya, Indonesia mayoritas mengandalkan vaksin dari Tiongkok, terutama Sinovac, dalam proses vaksinasi. Dari total 235,6 juta dosis yang diberikan pada Januari hingga Oktober 2021, sekitar 80% adalah vaksin Sinovac (Bona, 2021). Vaksin yang diberikan oleh Tiongkok dinilai masih merupakan vaksin setengah jadi yang dipublikasikan oleh media yang didukung Tiongkok dan mengatasnamakan WHO. Fase ketiga dari uji klinis vaksin belum mencapai konklusi dan laporan dari dua fase awal sebelumnya tidak memberikan data yang meyakinkan (Wibowo, 2020).

Ketika wabah COVID-19 mulai menyebar di seluruh dunia, Tiongkok menunjukkan respons yang cepat dan efektif sebagai salah satu negara yang paling tanggap terhadap pandemi global ini. Dengan menerapkan kebijakan lockdown yang ketat dan seiring dengan pengembangan vaksin yang cepat, Tiongkok yang awalnya menjadi negara pertama yang menghadapi wabah ini berhasil berubah menjadi salah satu pemimpin dalam penanganan pandemi COVID-19. Di tengah persaingan sengit antara negara maju dalam pembuatan dan pengadaan vaksin, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, tertinggal dan mengalami kecemasan. Bermula dari permasalahan kesehatan ini melumpuhkan berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, serta terkendalanya produktivitas masyarakat dalam beraktivitas. Penyelesaian untuk permasalahan kesehatan yang bervariasi

mebutuhkan hubungan interdependensi antara pasien, petugas kesehatan, sistem kesehatan, pendidikan, riset dan pengembangan, industri, yang pada akhirnya akan kembali pada masing-masing komunitas yang dituju. Interaksi kompleks ini akan melibatkan kumpulan individu selaku aktor-aktor di bidang kesehatan yang kemudian akan berpayung pada negara untuk mengemukakan dan mengetahui peran integral masing-masing dalam sistem yang luas.

Pengambilan tema kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok ini juga didasarkan pada pengalaman langsung penulis dalam partisipasinya yang memperlihatkan bahwa kerja sama antara kedua negara selama intensitas pandemi COVID-19 yang berlangsung di tahun 2020 – 2022 merupakan fenomena lapangan yang berdampak pada keseluruhan isu kesehatan masyarakat Indonesia seperti distribusi langsung vaksin COVID-19 dan pemenuhan kebutuhan nasional terkait alat-alat, masker, sarung tangan, reagen dan bahan habis pakai kebutuhan laboratorium yang selama penanggulangan pandemi berlangsung didominasi oleh Tiongkok. Interaksi antar aktor baik negara dan non-negara di antara Indonesia dan Tiongkok terlihat mengalami peningkatan drastis; sehingga perlu menilik dampaknya serta analisis implementasinya dalam naungan kompleksitas interdependensi yang terjadi untuk mengenali tujuan akhir dari kedua negara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Selagi kerja sama di bidang kesehatan antara Indonesia dan Tiongkok tetap stabil dan faktanya, semakin meningkat di tengah pandemi COVID-19, penting

untuk mencatat alasan dan faktor-faktor—terutama karena adanya interdependensi yang muncul dari kerja sama yang dilakukan. Isu kesehatan ini memiliki banyak isu-isu yang saling berkaitan—karena kesehatan akan berkesinambungan dengan isu lingkungan, perdagangan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, keamanan nasional, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, rumusan masalah yang ada diajukan sebagai berikut:

1. Mengapa kerja sama di antara Indonesia dan Tiongkok semasa penanggulangan pandemi COVID-19 di tahun 2020–2022 dapat dikarakterisasikan sebagai interdependensi kompleks?
2. Bagaimana proses implementasi dari interdependensi kompleks yang dilakukan melalui berbagai jalur kerja sama di antara kedua negara tersebut melalui keterlibatan BUMN, swasta, dan pemerintahan?
3. Bagaimana cara untuk memperkuat kerja sama berdasarkan interdependensi kompleks yang sudah terjadi di antara Indonesia dan Tiongkok?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor penentu intensitas kerja sama di antara Indonesia dan Tiongkok di tengah pandemi COVID-19, merujuk kepada berbagai sektor yang berkaitan erat kerjasamanya di antara kedua negara. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan alasan perluasan dan pendalaman kerja sama Indonesia dan Tiongkok sebagai interdependensi kompleks yang melibatkan berbagai aktor baik

pemerintahan ataupun swasta pada periode tahun 2020-2022 untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.

2. Mendeskripsikan secara sistematis mengenai implementasi proses interdependensi kompleks dalam kerjasama bidang kesehatan (industri, perdagangan, riset dan pengembangan, dan edukasi) dengan aktor-aktor yang terlibat seperti institusi pemerintahan, BUMN, dan pihak swasta.

3. Menjelaskan, berdasarkan hasil analisis berdasarkan data-data yang diperoleh, tentang cara memperkuat kerja sama Indonesia dan Tiongkok yang bernaung kepada interdependensi kompleks antara kedua negara.

Perumusan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konsep yang mendalam dan spesifik terkait dengan kerja sama bilateral Indonesia dan Tiongkok di bidang kesehatan selama pandemi pada periode tahun 2020-2022. Periode ini dipilih dikarenakan pada jangka waktu 2020-2022 inilah merupakan masa kolaborasi dengan Tiongkok semakin drastis di bidang kesehatan dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian akademik ini ditujukan untuk memiliki manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan isu-isu terkini berkaitan dengan kerja sama kesehatan di antara Indonesia dan Tiongkok beserta dinamikanya apabila disesuaikan dengan pembahasan di ranah Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang praktis guna pertimbangan untuk perencanaan kebijakan yang lebih efektif dan efisien kepada pemerintah seperti Kementerian, pemerintahan provinsi dan/atau daerah, organisasi

non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta pelaku swasta—baik dari Indonesia ataupun Tiongkok, guna menjamin kesinambungan dan keamanan kerja sama yang telah terjadi. Penelitian ini juga bermaksud untuk menekankan bahwa tidak hanya interaksi aktor-aktor negara yang berkontribusi dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di antara kedua negara, melainkan semakin intens dan terbukanya pula interaksi aktor-aktor non-negara antara Indonesia dan Tiongkok selama kerja sama terjadi di berbagai bidang yang secara langsung terkena dampak dari merajalelanya pandemi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini didesain sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang permulaan dan rangkaian hubungan bilateral di antara Tiongkok dan Indonesia, serta membahas sekilas riwayat kerja sama di antara kedua negara yang semakin intens dalam berbagai skala, terutama di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 – 2022.

2. BAB II : Kerangka Teori

Penjelasan terkait tinjauan pustaka dan kerangka teori yang menjadi dasar hipotesis dari penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka berisi perspektif dan hasil literatur dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebagai pendukung pengembangan argumen. Kerangka teori berperan untuk memberikan rangkaian konsep yang akan digunakan untuk memilah analisis penelitian secara ilmiah.

3. BAB III : Metode Penelitian

Pendekatan dan metode penelitian akan dijelaskan dalam bab ini. Pendekatan penelitian akan dipaparkan alasannya sebagai cara yang tepat untuk menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan. Metode penelitian yang dicantumkan dalam bab ini akan berperan penting sebagai cara yang dilakukan untuk pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan analisis data-data yang menunjang penelitian.

4. BAB IV : Analisis

Bab ini mengemukakan bagaimana teori dan konsep dari interdependensi kompleks digunakan sebagai dasar dalam menganalisis data-data temuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang telah diajukan yang berkesinambungan dengan tema interdependensi kompleks pada kerja sama kesehatan antara Indonesia dan Tiongkok selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 – 2022.

5. BAB V : Kesimpulan

Keseluruhan isi penelitian akan diringkas dalam bab ini, dengan permulaan mengenai latar belakang interdependensi kompleks pada kerja sama kesehatan antara Indonesia dan Tiongkok selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 – 2022, hingga teori dan konsep singkat yang menjadi dasar untuk mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang didapatkan sebagai hasil untuk menjadi kesimpulan tesis.